

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
DI KELURAHAN TELUK MERANTI KECAMATAN TELUK MERANTI
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015-2016**

Rayun Ramadhan

Email: Ramadhanrayun@yahoo.com

Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to determine the relationship society, government, and private in preparation corporate social responsibility PT. RAPP programs in Teluk Meranti village. The problem in this research is corporate social responsibility activity implemented by PT. RAPP is almost the same in every year and more inclined to charity. This can be seen in corporate social responsibility program activities 2015-2016. Therefore, the problem formulation this research is how relationship society, government, and private in preparation corporate social responsibility programs. With the aim to know and analyze stakeholders relationship in preparation corporate social responsibility programs. This research uses qualitative research method with descriptive research type with data collection is done by observation, interview, and documentations. From the results of the research show that relationship society, government, and private in preparation corporate social responsibility carry out their respective duties. This is seen when implementation rembuk desa. Rembuk desa implemented request by PT. RAPP. At the time rembuk desa, public expressed his aspiration to be recorded by company, then company discussed it further in company office. While the role of the company is more dominant in determining all activities to be implemented. The company also performs several stages in preparation. First, make evolution as an benchmark of future activities. Second, the company follows government's musrenbang. And lastly do activity assessment.

Keywords: Relationship society, government, private, Corporate Social Responsibility

Pendahuluan

Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara. Pertama yaitu adalah Pemerintah (*government*) Kedua, Masyarakat (*community*). Ketiga, dunia usaha (*coporate*). Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula masyarakat dan lingkungan hidup. Dunia usaha sekarang tidak hanya memikirkan kegiatan usahanya semata melainkan meliputi aspek keuangan, sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu Pemerintah mewajibkan dunia usaha baik itu BUMN maupun Perseroan Terbatas untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar *profitability*. Dalam menerapkan CSR, umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan. CSR merupakan paradigma baru yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan, sebagai tanggung jawab

sosial perusahaan dalam memperhatikan dan mengembangkan kehidupan masyarakat.¹

Dasar Hukum Pelaksanaan CSR yang sering di artikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau di dalam Perda ini di jelaskan jenis-jenis program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Kemitraan, Program Bina lingkungan, donasi dan Promosi.

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut tidak semua kegiatan bisa dikatakan sebagai kegiatan CSR melainkan ada indikator atau unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya bisa dikatakan suatu kegiatan sebagai kegiatan CSR. Beberapa indikator tersebut adalah harus tepat sasaran yaitu orang yang membutuhkan, selanjutnya kegiatannya harus terus menerus atau berkelanjutan, menekankan pada pemberdayaan dengan partisipasi penuh oleh masyarakat. Oleh karena itu, tiga aspek yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan CSR adalah Masyarakat, Pemerintah dan Pihak Swasta harus bekerja sama dalam pelaksanaan

¹ Dr. H. Zulkarnain, SE,MM *Pemberdayaan masyarakat Miskin* (Yogyakarta:Ardana Media:2010) hal 9

CSR. Menurut Histiraludin partisipasi sebagai alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan Proses kegiatan, sebagai media kohensifitas antar masyarakat, masyarakat dengan Pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa ingin memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan.²

Salah satu Perseroan Terbatas yang melaksanakan CSR adalah PT. Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Kelurahan Teluk Meranti PT. Riau Andalan Pulp and Paper merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pembuatan *pulp* dan kertas. Lokasi PT. Riau Andalan Pulp and Paper terdiri dari dua tempat, lokasi pabrik di Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, ±80 Km sebelah Timur dari Kota Pekanbaru dan jaraknya ±5 Km dari Sungai Kampar. Kantor pusat terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Gedung BNI lantai 20-22, Jakarta. Salah satu daerah Produksinya adalah di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.

Di dalam pelaksanaan kegiatan CSR di PT. Riau Andalan Pulp and Paper di setiap daerah dibagi-bagi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan CSR seperti Estate Teluk Meranti yang mana setiap Estate ini akan ditugaskan seorang pegawai dari perusahaan. Begitu banyak jenis program CSR yang diatur oleh Peraturan daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan CSR oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper cenderung jenis program yang di laksanakan setiap tahunnya hampir sama pada tahun sebelumnya padahal kebutuhan masyarakat tidak hanya di bidang ekonomi saja melainkan perlunya program yang non ekonomi seperti pendidikan politik atau moral bagi masyarakat sekitar area perusahaan supaya tidak mudah terprovokasi oleh gerakan-gerakan yang muncul di tengah masyarakat yang akan berdampak terhadap hubungan masyarakat dan perusahaan. Berikut adalah jenis-jenis kegiatan CSR PT. RAPP untuk Kelurahan Teluk Meranti pada tahun 2015 dan 2016:

Tabel 1.1
Kegiatan CSR RAPP Tahun 2015

| No | Program | Jenis Kegiatan | Satuan | Penerima |
|----|------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | IFS | Bantuan mesin perontok jagung | 1 Paket | Masyarakat TM |
| | | Budidaya nenas | 1 Paket | Masyarakat TM |
| | | Bantuan jaring | 1 Paket | Masyarakat TM |
| | | Produksi batik | 1 Paket | Pemuda TM |
| | | Bantuan bibit nenas madu | 9000 btg | Masyarakat TM |
| | | Penyediaan peluang usaha | 1 Paket | Suhaimi |
| 2 | Pendidikan | Beasiswa SLTA | 12 Org | SMAN 1 TM |
| | | Bantuan genset dan alat permainan | 1 Paket | TK Bono sakti dan SD TM |
| 3 | Kesehatan | Pengadaan PMT | 50 Paket | Balita TM |
| | | Bantuan baju kader Posyandu | 33 Org | Kapos TM |
| | | Lomba balita sehat | 1 Event | Masyarakat TM |
| | | Bantuan sunatan | 1 Event | Masyarakat TM |
| 4 | Sosial | Pengembangan kelembagaan | 1 Event | Masyarakat TM |

² Suci Handayani. *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Surakarta:Kompip:2006)

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------|-----------------|
| | | Pengadaan peralatan dan seragam untuk mencegah kebakaran | 1 Event | Masyarakat TM |
| | | Pembiayaan event Pertandingan | 1 Event | Pemuda TM |
| | | Bantuan peralatan olahraga | 1 Event | Masyarakat TM |
| 5 | Peningkatan infrastruktur Desa/ Kel | Pelatihan Imam dan Khatib | 1 Org | |
| | | Rehab balai Adat | 1 Paket | Balai Adat TM |
| | | Bantuan material Mesjid | 1 Paket | Mesjid T. Punak |
| 6 | Gotong royong | Employee Voluntering | 1 Kali | TM |

Sumber: Data Olahan CD Rapp Estate Teluk Meranti 2015

Tabel 1.2
Kegiatan CSR RAPP tahun 2016

| No | Program | Jenis Kegiatan | Satuan | Aktual | Penerima |
|----|------------|----------------------------|----------|---------|---------------|
| 1 | SME'S | Pelatihan Menjahit | 1 Event | Okt-Nov | Fatmawati |
| | | Pelatihan Mekanik Lanjutan | 1 Event | Nov | M. Suhaimi |
| 2 | Pendidikan | Beasiswa Perguruan Tinggi | 1 Event | Dec | Alfin |
| | | Beasiswa SMA | 1 Event | Nov | SMAN 1 TM |
| 3 | Kesehatan | Paket Makanan Tambahan | 60 Paket | Sep | Balita TM |
| | | Lomba Balita Sehat | 1 Paket | Sep | Balita TM |
| 4 | Sosial | Pembangunan Tiang Bendera | 1 Paket | Agt | Kecamatan TM |
| | | Bantuan Komputer dan Print | 1 Paket | Agt | Balai Adat TM |
| | | Paket Olahraga | 1 Paket | Agt | Pemuda TM |
| | | Gotong Royong | 1 Event | Feb | Masyarakat TM |
| | | Pelatihan Ustad | 1 Event | Nov | Zulkifli |
| | | Rehab Jembatan | 1 Paket | Dec | Masyarakat TM |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 5 | IFS | Pelatihan Budidaya Sapi Bali | 1 Paket | Mei | KT Sepakat Tani |
| | | Bantuan Ternak Sapi Pola RF | 8 Ekor | Mei | KT Sepakat Tani |
| | | Bantuan Saprodi Program FFV | 2 Paket | Sep-Okt | KT Tiga Sahabat |
| | | Pelatihan Budidaya Padi Sawah | 1 Event | Okt | KT Tiga Sahabat |

Sumber: Data Olahan CD Rapp Estate Teluk Meranti 2016

Dari tabel program kegiatan CSR pada tahun 2015-2016 diatas bisa kita lihat kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT. RAPP kebanyakan hanya bersifat sementara dan bersifat bantuan saja. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “**Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang dan fenomena-fenomena diatas. Maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pola hubungan Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam penyusunan program Corporate Social Responsibility PT. RAPP di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti tahun 2015-2016?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyusunan program Corporate Social Responsibility yang dilakukan PT. RAPP
- b. Untuk menganalisa bentuk hubungan Stakeholders dalam penyusunan Program Corporate Social Responsibility.

Kerangka Teoritik

1. Triple Bottom Line

Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak hanya pada *single bottom lines* yaitu, nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. *Triple Bottom Line* dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*”. Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dengan istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”.³ Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

2. Coporate Social Responsibility

Bowean mendefenisikan CSR sebagai kewajiban Pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan nilai-nilai masyarakat. Defenisi tersebut, kemudian di perbarui oleh Davis yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian,

³ John Elkington, *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*, dikutip dari Teguh Sri Pembudi, CSR, Sebuah Keharusan

dalam Investasi Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSSENSOS) Departemen Sosial RI, Jakarta, La Tofi Enterprise, 2005. hal 19

melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.⁴

Sedangkan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka dan masyarakat lokal.⁵ Jadi secara umum CSR adalah seperangkat kebijakan, praktik dan program yang terintegrasi di seluruh operasi bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memaksimalkan dampak positif dari operasinya pada masyarakat atau operasi dengan cara yang memenuhi atau melebihi etika, hukum, komersial dan harapan publik.

Jones mengklarifikasikan pemangku kepentingan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: pertama, *Inside stakeholder* terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk dalam *inside stakeholder* adalah pemegang saham (*stockholder*), para manager (*managers*) dan karyawan (*employee*). Kedua, *Outside stakeholders* terdiri dari orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang di lakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kedalam kategori *outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*) masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat secara umum (*general public*).⁶

Adanya teori *stakeholder* ini memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Adanya program tersebut pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.⁷

Menurut Studi Bank Dunia peran Pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan Insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang di alami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koodinator penangan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang berkompeten. Setelah itu pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memeberi penghargaan pada kalangan bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

3. Formulasi Kebijakan

Menurut Sidney formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan.⁸ Formulasi adalah turunan dari formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk

⁴ Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. (Bandung:Alfabeta:2014) hal 86

⁵ *Ibid.*, hal 93

⁶ *Ibid.*, hal 130

⁷Andreas Iako. *Dekonstruksi CSR dan reformasi paradigma bisnis dan akuntansi* (Jakarta:Ardana:2011) hal 5

⁸ Leo agustino. *dasar-dasar kebijakan publik* (bandung:ALFABETA:2016) hal 97

tindakan dalam suatu masalah. Formulasi adalah istilah yang menyeluruh termasuk kedalamnya perencanaan dan usaha yang kurang sistematis untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap masalah umum. Herbert J. Gans mendefinisikan “rencana sosial” yaitu suatu metode untuk membuat keputusan yang mengusulkan satu mengidentifikasi tujuan atau sasaran, menentukan cara atau program untuk mencapai atau yang diperkirakan mencapai akhir, dan dilaksanakan dengan teknik analitis untuk menemukan keseimbangan antara tujuan dan cara dan konsekuensi dalam menjalankan alternatif tujuan dan pengertian.

Memahami formulasi kebijakan publik berarti kita juga perlu mengetahui model-model perumusan kebijakan publik yang telah banyak digunakan. Menurut Dye dalam bukunya *Understanding public policy* (1992) setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan yaitu; model sistem, model elit, model institusional atau model kelembagaan, model kelompok, model proses, model rasional, model inkremental, model pilihan publik dan model teori permainan.

4. Triple Alliance

Dalam mempercepat pembangunan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah membutuhkan kerjasama yang melibatkan semua pihak. Kerjasama yang dibutuhkan yaitu kerjasama berkesinambungan. Menurut Evans dalam pembangunan suatu negara, negara perlu melakukan kerjasama yang disebut *Triple Alliance* yaitu kerjasama antara: (1). Modal Asing (2). Pemerintah Daerah (3). Borjuis lokal.⁹ Jika dalam pembangunan negara mempresentasikan peranan *political Society*, sedangkan Swasta/kapitalis mempresentasikan peranan *economy society*, maka Masyarakat

mempresentasikan peranan *civil society*. Menurut Davis kerjasama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan.¹⁰

Defenisi Konseptual

a. CSR

CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka dan masyarakat lokal. Jadi secara umum CSR adalah seperangkat kebijakan, praktik dan program yang terintegrasi di seluruh operasi bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memaksimalkan dampak positif dari operasinya pada masyarakat atau operasi dengan cara yang memenuhi atau melebihi etika, hukum, komersial dan harapan publik.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat itu sendiri berakar dari bahasa Arab yaitu *musyaraka*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling bergantung satu sama lain. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk

⁹ Khairul Anwar. 2011. *Daerah Pinggiran dan Kapitalisme Internasional*. Pekanbaru: Alaf Riau. Hal 8

¹⁰ Dewi Futriana. 2006. *Kontribusi Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Kajian pada Karyawan Operasional di DAOP 2 PT. KAI (Persero)*. Bandung: FPIPS UPI

mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas.¹¹

c. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum yang merupakan kawasan di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Atau Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur serta mengatur jalannya suatu sistem Pemerintahan.

d. Swasta dan Perusahaan

Swasta adalah bukan milik Pemerintah dengan kata lain adalah swasta berada diluar Pemerintah yang mengelola dan modalnya berasal dari kalangan di luar Pemerintahan secara penuh.

Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu informan dalam latar ilmiah.¹² Menurut Jhon SW. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah

sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.¹³

Pembahasan

Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam corporate social res[onsibility PT. RAPP

Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang hanya bersifat sementara, melainkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut, mengarah kepada hubungan tiga sektor dimana sinergitas peran berbagai pihak diperlukan seperti masyarakat, pemerintah dan swasta atau dunia korporate. Sama halnya dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sinergitas dari ketiga sektor tersebut diperlukan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan begitu, perusahaan tidak lagi hanya mempunyai peran sekedar *single bottom line* yang memperhatikan keuntungan saja. Melainkan meliputi aspek sosial, aspek keuangan, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dan konsep pembangunan berkelanjutan. Wibioso mengatakan bahwa dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang

¹¹<http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat> jam 22.06 tgl 1 April 2017

¹² Nanag Martono. Metode Penelitian sosial: Konsep-konsep Kunci (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada:2015) hal 212

¹³ Prof. Dr. S. Nasution, M.A. *Metode Research*. (Jakarta:PT. Bumi Aksara: 2011) hal 106

bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat etis.¹⁴

Kosentrasi program didasarkan pada aspek pemberdayaan masyarakat yang bertitik tolak kepada aspek kebutuhan masyarakat. Salah satu proses yang penting dalam pelaksanaan CSR adalah tahap perencanaan. Secara umum perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan dengan menyusun strategi yang menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Keseimbangan *triple bottom line* merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk bersinergi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara konsistensi mendorong keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Idealnya, tentu saja perusahaan melakukan seluruh kegiatan *triple bottom line* bagi para *stakeholders*-nya. Namun, hal yang terpenting sebenarnya, perusahaan melakukan CSR dengan menekankan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan dari deklarasi Rio pada tahun 1992 adalah sebagai berikut:¹⁵

Hubungan Pemerintah dan Swasta

Hubungan Pemerintah dan swasta dalam penyusunan program CSR sebagai salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta yang biasa disebut sebagai *public private Partnership* salah satu contohnya adanya Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah. Upaya ini bukanlah hal yang tabu pada masa sekarang ini, terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur mengingat pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar dan keterbatasan material yang dimiliki oleh pemerintah, Sementara kebutuhan yang lainnya semakin meningkat. Selain pembangunan dengan diadakan kerjasama antara pemerintah dan

- a. Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam.
- b. Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.
- c. Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka.

Untuk mewujudkan itu semua tentu diperlukan keterlibatan dan hubungan yang baik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam penyusunan Program kegiatan CSR supaya berdampak positif baik bagi Masyarakat, Pemerintah maupun pihak Swasta. Untuk itu penulis menguraikan ketiga hubungan tersebut sebagai berikut:

swasta hal ini juga memperkuat pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan CSR PT. RAPP di Kelurahan Teluk Meranti, hubungan Pemerintah dan Swasta bisa kita lihat dalam penyusunan Program CSR yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pada tahap perencanaan pihak Kelurahan menyediakan forum diskusi untuk mempertemukan ketiga *stakeholders*. Forum diskusi ini diadakan untuk membahas perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepannya. Forum diskusi tersebut dilaksanakan atas usulan dari pihak perusahaan yang sering disebut rembuk desa.

Pada tingkat Kabupaten juga dilakukan rapat mengenai CSR yang dilaksanakan

¹⁴ Yusuf Wibisono. *Membedah konsep & aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. (Gresik fascho publishing 2007) hal 9

¹⁵ UNCED, *The Rio Declaration on Environment and Development*, 1992 dalam Mitchell et al.2003)

oleh Forum CSR yang berada di lingkungan Pemerintah kabupaten Pelalawan. Rapat perencanaan kegiatan CSR ditingkat Kabupaten dihadiri oleh semua perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan dengan kata lain rapat tersebut dilakukan secara umum untuk semua perusahaan untuk mempresentasikan rencana program mereka untuk satu tahun kedepannya. Pihak pemerintah juga memberikan usulan kegiatan kepada perusahaan yang mana kegiatan tersebut diusulkan karena ketidakmampuan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas dan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan CSR hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau dijelaskan pada pasal 7 pada bagian c yaitu perusahaan mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas dan/ atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam Pelaksanaan CSR. Hal ini juga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan lebih baik lagi kegiatan CSR-nya.

Sedangkan di perusahaan dalam terdapat beberapa formulasi dalam penyusunan CSR yang hanya dilakukan oleh PT. RAPP yaitu sebagai berikut: Tahap pertama adalah menjadikan evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai gambaran kegiatan CSR yang akan dilaksanakan kedepannya. Mengingat evaluasi sangat penting bagi perencanaan kedepannya. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai.

Tahap kedua, Perusahaan mengikuti Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di daerah produksinya karena sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Maksud dari perusahaan mengikuti musrenbang ini adalah supaya perusahaan tahu apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, serta menjadikannya pedoman

untuk merencanakan kegiatan CSR supaya tidak terjadi dualisme kegiatan. Seperti renovasi sekolah pembangunan jembatan dan lain-lain.

Tahap ketiga, untuk program-program sistem pertanian, peternakan, dan lainnya, dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan analisis terhadap persoalan yang mendasar, agar kegiatan tersebut berhasil dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dalam penyusunan CSR bisa kita lihat dari perencanaan sampai dengan penetapan Program CSR. Sebagaimana tujuan dari pemerintah sendiri dengan diadakannya kegiatan CSR masyarakat bisa diberdayakan melalui swasta. Kenapa harus pemberdayaan masyarakat untuk CSR, karena apabila dilakukan pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan adanya dampak ganda (*multiplier effect*) yang lebih besar dan mampu secara bertahap mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlepas dari ketergantungannya kepada pemerintah maupun koperasi yang telah berbaik hati membantu masyarakat yang dalam kesusahan.

Tidak hanya pemerintah memperhatikan masyarakat diberdayakan melalui CSR tetapi pemerintah juga memastikan keikutsertaan masyarakat baik dalam perencanaan maupun pada pelaksanaan program CSR. Untuk itu pihak Kelurahan memastikan setiap perwakilan dari elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat mengikuti rembuk desa. dan ketika masyarakat ingin menjalankan kegiatan CSR maka terlebih dahulu membuat proposal pengajuan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat yang diketahui oleh pihak Kelurahan. Dengan diberlakukannya sistem seperti itu maka pihak Kelurahan menjalankan fungsinya sebagai *controlling* dari Pemerintahan.

Dengan terapkannya sistem tersebut juga menimbulkan masalah baru di masyarakat mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat membuat kegiatan CSR hanya dilakukan oleh masyarakat yang hanya mengetahui mengenai teknologi dan sarana lainnya dalam pembuatan proposal kegiatan.

Hubungan Swasta dengan Masyarakat

Dalam penyusunan Program CSR masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tertuang pada pasal 8 bagian d yang berbunyi perusahaan berkewajiban menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dengan adanya rembuk desa ini masyarakat bisa memanfaatkan forum rembuk desa sebagai wadah penyampaian aspirasi.

tidak semua aspirasi dari masyarakat yang menghadiri rembuk tersebut di setujui oleh pihak perusahaan. Karena pihak perusahaan akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat dengan melihat mana kegiatan yang harus diutamakan dan juga melihat program-program yang telah pemerintah rencanakan supaya tidak terjadi dua kegiatan berjalan secara bersamaan. Dengan kata lain, semua program CSR yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper keputusannya berada ditangan pihak perusahaan. Bukan berdasarkan keputusan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Dan dengan diadakannya pembuatan proposal oleh masyarakat maka secara otomatis perusahaan belum menentukan masyarakat sasaran dalam program CSR. seharusnya masyarakat yang menjadi hal utama harus ditentukan atau ditetapkan terlebih dahulu dan dilakukan pengkajian supaya program CSR tepat sasaran. Serta masyarakat tidak lagi menjadikan pembuatan proposal sebagai kendala dalam pelaksanaan CSR.

Program-program CSR yang dilakukan PT. RAPP terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan sesuai dengan fokus dan tujuannya masing-masing. Berikut adalah beberapa kegiatan CSR PT.RAPP:

a. Pendidikan

Dalam pelaksanaan program CSR PT. RAPP pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan menjadi salah satu yang menjadi perhatian khusus perusahaan karena mengingat masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disekitar area operasional perusahaan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan memegang sebuah peranan penting dalam membangun peradaban suatu bangsa. Pendidikan dijadikan tolak ukur dari maju tidaknya suatu bangsa, semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk tersebut. Pelaksanaan program pendidikan dilakukan atau dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan siswa-siswi yang berprestasi, seminar pendidikan, pelatihan, dan bantuan perlengkapan sekolah.

b.Kesehatan

Pada bidang kesehatan, perusahaan berusaha untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya diwilayah operasional perusahaan. Dalam pelaksanaannya perusahaan bekerjasama dengan pemerintah dan puskesmas maupun posyandu

c. Sosial dan Peningkatan Infrastruktur

Dalam program pada bidang sosial. Pada kegiatan ini perusahaan melakukan atau memberikan bantuan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan seperti pengembangan kemasyarakatan, pelatihan pengembangan pengetahuan. pengadaan peralatan dan seragam untuk mencegah kebakaran, pembiayaan event

pertandingan, bantuan peralatan olahraga dan lainnya.

d. *Integreted Farming System (IFS) / Sistem Pertanian Terpadu*

Sistem pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan beberapa subsektor pertanian, dalam arti luas yaitu pengembangan peternakan, pertanian tanaman pangan dan pengembanan perikanan serta perkebunan yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan CSR adalah pada penyusunan program. Dalam penyusunan program kegiatan CSR PT. RAPP dilihat dari dua tahapan. tahap yang pertama penyusunan program CSR yang hanya dilakukan oleh PT. RAPP. Pada tahap ini perusahaan menjadikan evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai gambaran kegiatan CSR yang akan dilaksanakan kedepannya. Mengingat evaluasi sangat penting bagi perencanaan kedepannya. proses selanjutnya, Perusahaan juga mengikuti musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di daerah produksinya. Maksud dari perusahaan mengikuti musrenbang ini adalah supaya perusahaan tahu apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, serta menjadikannya pedoman untuk merencanakan kegiatan CSR supaya tidak terjadi dualisme kegiatan. Seperti renovasi sekolah pembangunan jembatan dan lain-lain. proses terakhir, untuk program-program sistem pertanian, peternakan, dan lainnya, dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan analisis terhadap persoalan yang mendasar, agar kegiatan tersebut berhasil dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Hubungan masyarakat, pemerintah dan swasta dapat dilihat pada penyusunan kegiatan CSR. penyusunan dilakukan oleh tiga *stakeholders* yaitu Masyarakat, Pemerintah dan Perusahaan itu sendiri. Pada tahap ini untuk mempertemukan ketiga *stakeholders* diadakan sebuah forum

diskusi yang disebut Rembuk desa. Rembuk desa tersebut diselenggarakan oleh pihak Kelurahan atas usulan pihak perusahaan. Di dalam rembuk desa tersebut masyarakat akan menyampaikan aspirasi untuk kegiatan satu tahun kedepannya, dan pihak perusahaan akan mencatat semua aspirasi dari masyarakat yang kemudian akan dibawa ke perusahaan untuk dibahas lebih lanjut mengenai program mana yang lebih dahulu yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten juga diadakan rapat CSR di BAPPEDA di dalam rapat tersebut dihadiri oleh semua perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan. Pada rapat tersebut perusahaan akan membawa rancangan kegiatan CSR mereka kemudian menyampaikannya pada rapat CSR. Pemerintah juga menyampaikan usulan-usulan kegiatan yang pemerintah limpahkan ke Perusahaan karena pemerintah belum mampu untuk melaksanakannya.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkat dampak positif dari pelaksanaan kegiatan CSR maka Pemerintah harus menetapkan standar pelaksanaan kegiatan CSR dan pemerintah mampu menjadi koordinator yang baik dalam pelaksanaan kegiatan CSR.
2. Perlu diadakannya kegiatan pengenalan dan pengkajian secara mendalam mengenai apa itu CSR dan bagaimana pelaksanaannya yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Mengingat banyaknya kegiatan CSR yang dilaksanakan tidak sesuai dengan unsur-unsur supaya suatu kegiatan bisa dikatakan sebagai kegiatan CSR.

- Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan CSR, diperlukan sosialisasi kegiatan CSR yang telah ditetapkan supaya masyarakat mengetahui apa-apa saja kegiatan satu tahun kedepannya. Hal ini diperlukan karena dengan masyarakat tahu, otomatis masyarakat bisa melihat perkembangan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan CSR.

Daftar Pustaka

Buku:

- Zulkarnain. 2010. *Pemberdayaan masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Ardana Media
- Handayani Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip
- wahyudi Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan implementasi*, Malang
- Untung Budi. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: PT. ANDI Yogyakarta
- Andreas Iako Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan reformasi paradigma bisnis dan akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Rumanti Maria Assumpta. 2005. *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik* Jakarta: PT. Grasindo.
- Mardikanto Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta

Martono Nanang. *Motode Penelitian sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nawawi Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Abdul wahab Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Agustino Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: ALFABETA

E Linblom Charles. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*. Jakarta: Erlangga

Khairul Anwar. 2011. *Daerah Pinggiran dan Kapitalisme Internasional*. Pekanbaru: Alaf Riau

Dewi Futriana. 2006. *Kontribusi Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Kajian pada Karyawan Operasional di DAOP 2 PT. KAI (Persero)*. Bandung: FPIPS UPI

Johanes Ibrahim. 2006. *Perilaku Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Miftah Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi dan Konsep Dasar dan aplikasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada.

Jurnal :

Ahmad Bakhtiar Amin "Pola Hubungan Masyarakat dan Industry: Studi Kasus Interaksi antara Komunitas Desa Pandan Jaya dengan Perusahaan Tambang PetroChina Internasional Jabung Ltd. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi" *Jurnal Of Social and*

Political Development Vol. 2 No. 2
Juli-Agustus 2012.

Er Ah Choy “*Tanggung Jawab sosial Korporat (TSK): faktor pendorong dan penghambat kejayaan TSK yang di laksanakan Syarikat Pembuatan Semen Padang, Sumatera*” Jurnal Of Social and Political Development Vol. 2 No. 2 Juli-Agustus 2012.

Sarmila Md Sum, Zaimah Ramli dan Marsita Mohd Radzi “*Pembangunan Modal social Melalui Inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR): Kajian Kes Penglibatan Komuniti dalam Projek CSR Perladangan Cili Kontrak di Pasir Putih Kelantan, Malaysia.* Jurnal Of Social and Political Development Vol. 2 No. 2 Juli-Agustus 2012.

Isma Rosyida dan Fredian Tonny Nasdin. *Tentang Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan.* Jurnal Transdisiplin Sosiologi, dan ekologi Manusia/ ISSN : 1978-4333/ Vol.05/ No.01/ Hal.51-57

Antonius Suhadi, AR. Febian dan Sri Turatmiyah Tentang *Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batu Bara Di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan lokal.* (Ringkasan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dari Dana DIPA UNSRI No. 023-04.2.415112/2013 Tanggal 15 Desember 2012)

Surat Keputusan Camat Teluk Meranti Nomor : 140/PEM/2009/03 Tentang Pembentukan Tim 40 Negosiasi Masyarakat Kelurahan Teluk Meranti dengan Pihak Perusahaan.

Data CD tahun 2015 dan 2016 Kelurahan Teluk Meranti

Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.050/BAPPEDA/431/2015 Tentang Pemberian Penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Pelalawan tahun 2014-2015

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau

Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat>

Jam 22.06 di akses pada tanggal 1 April 2017

Dokumen